



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jalan Merdeka Nomor 10 A Palembang Telp 0711 363480 Fax 0711 363480
Website : www.kominfo.sumselprov.go.id / www.sumselprov.go.id
e-mail : kominfosumselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang cepat berubah dan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan aparatur. Sesuai ketentuan penyusunan Laporan Kinerja maka seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan juga melaporkan Hasil Capaian Kinerja selama setahun dengan memakai pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Demikianlah Kami Laporkan, semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun tahun mendatang.

Palembang, Februari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFIANTI, SE., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198407222008032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	2
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	6
1.4. Landasan Hukum.....	8
1.5. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Rencana Kinerja	15
2.3. Perjanjian Kinerja.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.2. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Rekomendasi.....	76
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, sehingga Laporan Kinerja ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025 dengan alat ukur 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD tahun 2025 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

B. Fungsi

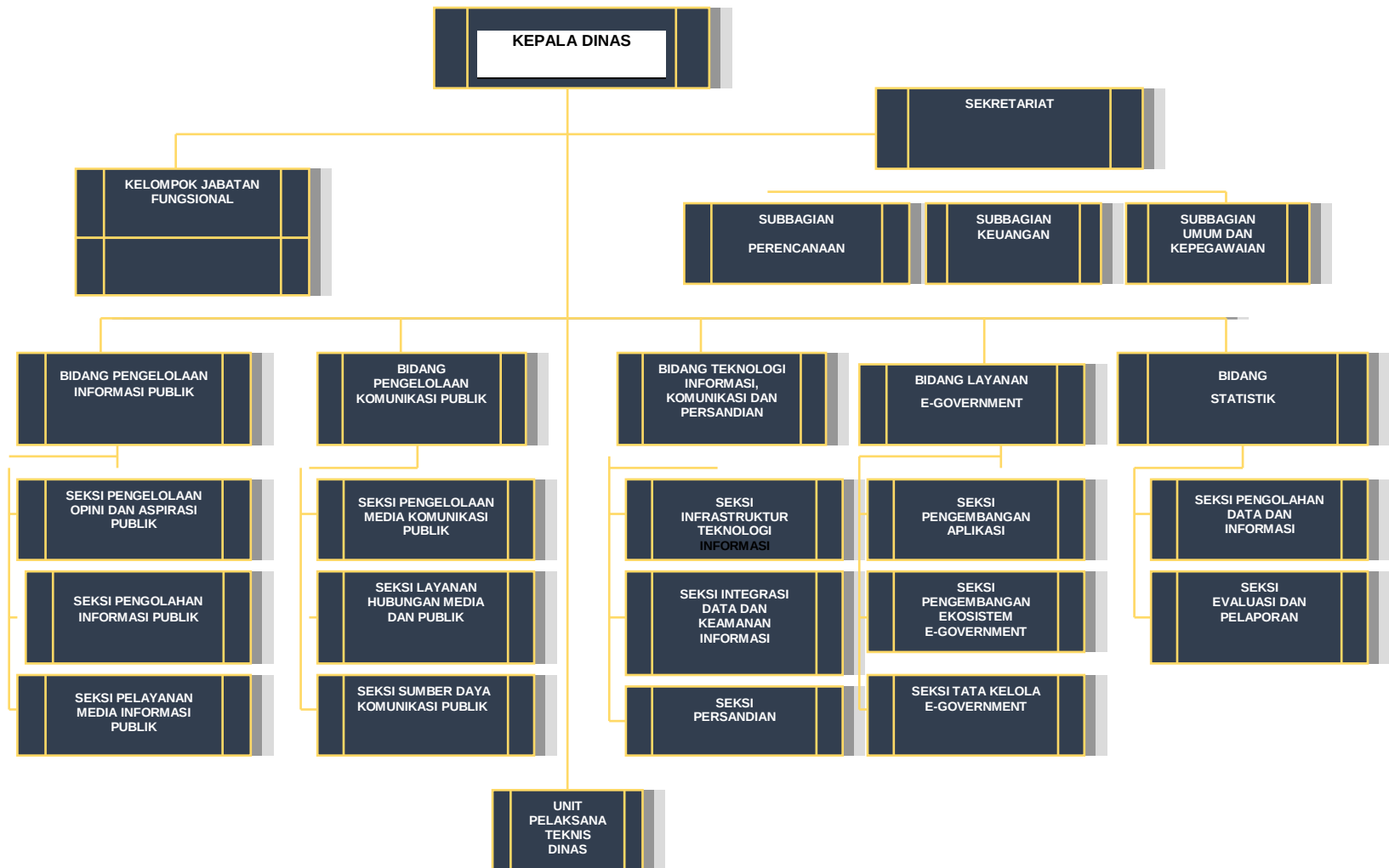
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;

- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Persandian dan Statistik;
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- (4) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- (5) Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Data Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan

pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

- (6) Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- (7) Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

1.3. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung layanan publik/Pemerintah pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan

proses layanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Layanan publik/Pemerintah secara digital yang mudah diakses dan aman;
2. Meningkatkan kualitas Pelatihan Kompetensi dan Pengembangan SDM ASN;
3. Peningkatan dalam penyediaan data/Informasi dan Keamanan Informasi dalam menjaga kerahasiaan data secara digital;
4. Menyediakan konektivitas jaringan akses internet antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital.

Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan Prasarana infrastruktur yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Keamanan Informasi;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia IT, Statistisi, dan Sandiman;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Belum Optimalnya Layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah;

5. Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui layanan secara online dan integrasi.

1.4 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektorial Pasal 12);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik.

1.5 SISTEMATIKA

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tatakerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun Lalu
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Lalu

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan merupakan wujud komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 tidak terlepas dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya pada RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026.

Menurut Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kedepan akan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana Strategis/Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2025 - 2029 dan sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri serta selaras pada Visi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 - 2029, yakni :

“SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkanlah Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

1. Mewujudkan masyarakat sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;

2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;
7. Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Perwujudan gambaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka sinkronisasi percepatan dalam visi memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat berperan strategis dan dominan dalam menggambarkan visi tersebut. Hal ini dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola tatap muka konvensional yang selama ini digunakan dalam mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan,

publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yakni pada Misi Ke - 6 ***“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”***

Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral dengan menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan proses penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis.

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Sumsel Maju Terus Untuk Semua	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks IPTIK	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks IPTIK	Indeks	5,90	6,08	6,26	6,44	6,80	6,82
					Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,04	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09
					Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78
					Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	375	377	378	380	382	384

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN LALU

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Dalam tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Tingkat Kepuasan)	100 Orang tiap 17 kab/kota	-	-	100 Orang tiap 17 kab/kota					100 Orang tiap 17 kab/kota					100 Orang tiap 17 kab/kota				
2.	Pemeringkatan SPBE (Peringkat Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50 Besar Nasional	-	-	50 Besar Nasional					2,85 dengan Predikat Baik					2,85 dengan Predikat Baik				
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi)	Angka (Peringkat 30)	-	-	Angka (Peringkat 30)					Cukup Informatif (60 – 79,9)					Cukup Informatif (60 – 79,9)				
4.	Indeks Pembangunan Daerah/Data Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi (Sumatera Selatan Satu Data)	-	-	1 Sistem Informasi (Sumatera Selatan Satu Data)					Sumatera Selatan Satu Data					Sumatera Selatan Satu Data				
5.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3 (Nilai Aspek SPBE)	-	-	3 (Nilai Aspek SPBE)					2,85 dengan Predikat Baik					2,85 dengan Predikat Baik				
6.	Indeks keterbukaan informasi (peringkat nilai keterbukaan	Informatif (90-100)	-	-		Informatif (90-100)	Informatif (90-100)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)		

	informasi																		
6.	Indeks keterbukaan informasi (peringkat nilai keterbukaan informasi)	Informatif (90-100)	-	-		Informatif (90-100)	Informatif (90-100)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)		
7.	Persentase data statistik sektoral	100%	-	-		100%	100%				100%	100%				100%	100%		
8.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (Nilai SPBE)	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)	-	-		Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)				2,85 dengan Predikat Baik	Nilai Indeks 2,62 (Baik)				2,85 dengan Predikat Baik	Nilai Indeks 2,62 (Baik)		
9.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	-	-				80%	80%				80%	80%				80%	80%
10.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 kab/kota	-	-				5 kab/kota	2 kab/kota				5 kab/kota	1 kab/kota				5 kab/kota	1 kab/kota
11.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%

12.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%
13.	Persentase Akses Internet	87%	-	-			85%	87%	90%				87%	91%				87%	91%
14.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%	-	-				50%	70%				50%	70%				50%	70%
15.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%
16.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%

Sumber : Rencana Strategi Dinas Kominfo Tahun 2025 - 2029

Keterangan :

1. Indikator kinerja Utama pada Tahun 2019 Menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas
2. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan 2021 Menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas dan terdapat perubahan perhitungan pada indikator
3. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 dan 2023 menyesuaikan dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
					2024	2025	2024	2024
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	70 %	-	-	70 %	70 %	70 %	70 %
3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Jenis Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	90 %	-	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Tabel 2.4
Rencana Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Target Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	1.	Indeks IPTIK	Indeks	5,90	6,02
			2.	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,04	55,52*
			3.	Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,23
			4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,73	2,6
			5.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	375	415

Catatan : Pada Tahun 2025 berdasarkan Surat dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Nomor:B-655/SJ.1/PR.01.01/03/2026 Tanggal 16 Maret 2026 Hal Penyampaian Data Indeks Transformasi Digital Nasional Tahun 2023 dan 2024 Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan bahwa Pengukuran ITDN dilakukan dengan lagging 1 Tahun sehingga untuk kebutuhan perencanaan perhitungan ditahun 2025 masih menggunakan skor ITDN Tahun 2024 sebagai acuan sementara hingga hasil pengukuran tahun 2026 ini selesai.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2014, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain ;
 - c. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah provinsi.
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah daerah provinsi
 - b. Penetapan pola hubungan komunikasi, sandi antar perangkat daerah provinsi
3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah

Adapun tabel Program dan Kegiatan yang berkenaan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	17.892.944.750
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	122.560.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	122.560.000
2	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	11.307.977.940
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang / Bulan	11.048.257.940
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	236.880.000
4	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	22.840.000

3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	76.700.000
5	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	76.700.000
4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun	324.137.500
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	124.137.500
5	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun	1.045.154.930
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.750.000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	40.000.000
11	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	28.921.000

12	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	104.000.000
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	61.000.000
14	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000
15	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	672.483.930
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun	1.215.000.000
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	800.000.000
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit	415.000.000
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun	2.520.414.380
18	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000
19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	460.000.000
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	2.040.414.380

8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun	1.281.000.000
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	670.000.000
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	230 Unit	120.500.000
23	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Tiang Baliho yang terpelihara	7 Unit	90.000.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	400.500.000
	Urusan Komunikasi dan Informatika			
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	7.281.452.965
		2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	1.342.635.360
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%	8.624.088.325

	Pemerintah			
25	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	44.121.226
26	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	104.374.768
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90%	44.218.713
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi Publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	290.860.594
29	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	3.617.588.882
30	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	7 Konten	508.191.920
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	17 Komunitas	39.708.363
32	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	81.091.132
33	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1.254.295.421

	Sengketa Informasi Publik			
34	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	2 Laporan	2.639.637.306
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	90%	4.518.775.263
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%	143.730.685
35	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	143.730.685
11	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Persentase Pengguna e-government	90%	4.375.044.578
36	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Layanan	853.033.749

37	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	580.669.880
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	49 Perangkat Daerah	2.576.822.005
39	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	17 Kab/Kota	54.703.250
40	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	98.017.275
41	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	211.798.419
	Urusan Statistik			
IV	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	348.513.210
		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	18.288.723
12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah	Persentase data yang tersedia	100%	366.801.933

	provinsi			
42	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	91.150.136
43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistic	100 Orang	18.288.723
44	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	45.532.581
45	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	211.830.493
	Urusan Persandian			
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	204.607.238
13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	174.734.313

46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	27.970.055
47	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	146.764.258
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	49 Perangkat Daerah	29.872.925
48	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah	29.872.925
TOTAL				31.607.217.509

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

1. MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

2. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/ pemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
- b. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
- c. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
- d. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
- e. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
- f. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

URAIAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NILAI INDEKS SPBE	2.83 (BAIK)	2.83 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	3.00 (BAIK)	3.13 (BAIK)

3. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

4. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik.

5. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang Satuan Tugas Patroli Cyber yang bertugas untuk melaksanakan operasional Patrol Cyber di jejaring media agar sesuai dengan UU ITE, Mengamankan data Informasi elektronik pada pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Memantau ancaman Serangan Cyber dari luar, Mengevaluasi tingkat pemahaman kesadaran akan keamanan informasi siber, dan melaporkan secara berkala

pelaksanaan Cyber kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

6. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER) DAN BLANKSPOT

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik. Pelayanan *Data Center* merupakan layanan penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung penyimpanan data dan aplikasi berbasis server bagi seluruh OPD. Selama tahun berjalan, layanan ini telah digunakan dalam rangka memindahkan data dan layanan digitalnya ke data center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan jaringan TIK merupakan tulang punggung konektivitas antar - OPD dan antarwilayah di daerah. Selama tahun ini, telah dilakukan perluasan jaringan Internet dan Akses point di lokasi strategis. Penanganan blankspot juga menjadi prioritas, dengan pemetaan wilayah tanpa sinyal dan pembangunan menara mikro seluler serta kerja sama dengan operator seluler. Beberapa lokasi terpencil berhasil memperoleh akses internet dasar sebagai bentuk pelayanan publik digital yang inklusif.

7. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan dan Bimbingan Teknis maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

9. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

10. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

11. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs (www.SumateraSelatanProvinsigo.id) dan (www.Komunikasi dan Informatika .SumateraSelatanProvinsi.go.id) serta media lainnya yaitu Instagram, Facebook, dan Youtube Dinas.

12. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

13. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media. Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

14. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

15. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam Command Center tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Command center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

16. DATA SEKTORAL, SATU DATA INDONESIA, DAN DATA GEOSPASIAL

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku Walidata Provinsi telah merealisasikannya dengan mengeluarkan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 400.12/0224/I/DisKomunikasi dan Informatika /2025, Hal Data Kependudukan tahun 2024, tanggal 24 Januari 2025, yang mana maksud diedarkannya surat ini agar penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh instansi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Data Sektoral yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yang telah diperiksa dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Selatan melalui Portal
<https://satudata.SumateraSelatanProvinsigo.id/datasektoral/penduduk>

dan ketenagakerjaan penduduk. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan juga telah memfasilitasi kebutuhan Data Sektoral Terpilah yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Data Terpilah Kependudukan dan Data Terpilah Kepegawaian, sesuai yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**, dalam hal ini peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai regulasi ini adalah selaku Walidata yang memiliki kewenangan sesuai bunyi Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 bertugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data, menyebarluaskan Data dan melakukan pembinaan Data Tingkat daerah dalam membina Produsen Data.

Beberapa hal yang telah direalisasikan sesuai penugasan selaku Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik telah melaksanakannya, yakni dengan melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan selaku Pembina Data Statistik Sektoral. Diantara capaian hasil pembinaan ini adalah pencapaian indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dengan nilai indeks 2,72 (Predikat Baik) dan nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 2.00 (Predikat Kurang).

Mengenai Data Geospasial, sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Geospasial melalui Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, saat ini Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Portal pada alamat ***[https://geoportal.Sumatera SelatanProvinsigo.id](https://geoportal.SumateraSelatanProvinsigo.id)***. Portal ini merupakan versi terbaru Palapa 5.0 yang telah selesai diupgrade oleh pihak BIG pada tahun ini, Adapun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang berhasil melakukan upgrade dari versi sebelumnya.

Selaku pengelola Portal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki layanan Geospasial daerah diantaranya mendorong setiap Perangkat Daerah memiliki peta tematik berdasarkan Tupoksi.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja, dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi, mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik/ Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	1 Indeks IPTIK	Indeks	5,90
		2 Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,04
		3 Indeks SPBE	Indeks	3,04
		4 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,73
		5 Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	375

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2025 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi Akuntabilitas Kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Kinerja IKU
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik/ Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	1 Indeks IPTIK	Indeks	5,90	5,97
		2 Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,04	*51.61
		3 Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,13
		4 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,73	*2,72
		5 Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	375	446

Indikator Kinerja Utama pada Indeks IPTIK ini diambil dari data keluaran publikasi buku tahun 2024 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan nilai 5,97 , Data indeks IPTIK ini dikumpulkan oleh tim lapangan pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya. Indeks Pembangunan TIK merupakan suatu indeks

komposit yang disusun dari tiga subindeks, masing-masing terdiri atas indikator-indikator penyusun subindeks.

- * Subindeks akses dan infrastruktur TIK
- * Subindeks penggunaan TIK
- * Subindeks keahlian TIK

Indikator Kinerja Utama Pada Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah ini diambil dari Hasil Survey yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan. Menerangkan bahwa Pengukuran ITDN dilakukan dengan lagging 1 Tahun sehingga untuk kebutuhan perencanaan perhitungan ditahun 2025 masih menggunakan skor ITDN Tahun 2024 sebagai acuan sementara dengan Nilai 51.61.

Indikator Kinerja Utama pada Indeks SPBE ini diambil dari (PANRB) Laporan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2025 - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 3,13 dalam kategori “Baik”.

Indikator Kinerja Utama pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ini diambil dari Surat Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Pemerintah Daerah dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Keputusan Kepala BPS tentang hasil EPSS Tahun 2024. Data masih menggunakan Realisasi Tahun 2024 dengan nilai 2,72 Kategori “Baik”.

Indikator Kinerja Utama pada Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ini diambil dari Hasil pemeriksaan dokumen yang dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penilaian Mandiri Indeks KAMI versi 5.0 dan IKASANDI yang telah dibuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2025 secara daring. Nilai hasil atas verifikasi BSSN Indeks KAMI versi 5.0 dan IKASANDI dengan nilai 446.

Berdasarkan data keseluruhan Capaian Sasaran Kinerja IKU yang disajikan pada Tabel 3.2, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang terbagi dalam 1 (satu) sasaran strategis. Dari hasil penilaian sasaran pada tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat tinggi. Disamping terdapat Capaian Sasaran Kinerja IKU, ada pula Capaian Sasaran Kinerja IKK, yaitu :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Kinerja IKK
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Publik Pemerintah Daerah	1 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	75	82,98
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2 Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100

Indikator Kinerja Kunci pada Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) ini diambil dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan 10 unsur Penilaian, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Tarif, Perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, waktu pelaksana, produk pelayanan, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana, maklumat pelayanan. Nilai IKM (82,98) dalam Kategori “Baik”.

Indikator Kinerja Kunci pada Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah ini diambil dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 sudah menunjukkan adanya perkembangan yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian ini merupakan

akumulasi dari capaian masing masing sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025. Berikut terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, yaitu :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikators Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan	1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	80 %	80 %			
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	70 %	70 %	70 %			
5.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	3. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %			
		4. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %			
6.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah	5. Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	100 %	100 %			

7.	Meningkatnya Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	6.	Persentase Jenis Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	90 %	90 %	90 %			
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik / Meningkatnya Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital	7.	Indeks IPTIK				5.90	5.97	100 %
		8.	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah				56.04	*51.61	92%
		9.	Indeks SPBE				3.04	3.13	100 %
		10.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)				2.73	*2,72	99%
		11.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)				375	446	100 %

Catatan : pada Tahun 2024 menggunakan Renstra 2024 – 2026 dan pada Tahun 2025 menggunakan Renstra 2025 - 2029.

Sebelum melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, terlebih dahulu akan ditelaah capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029. Analisis capaian kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 berdasarkan indikator kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
Tahun 2025 pada kondisi akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik / Meningkatkan Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital	1.	Indeks IPTIK	5.97	6,82	100 %
		2.	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	*51.61	56,09	92 %
		3.	Indeks SPBE	3.13	3,26	100 %
		4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	*2,72	2,78	99 %
		5.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	446	384	100 %

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi

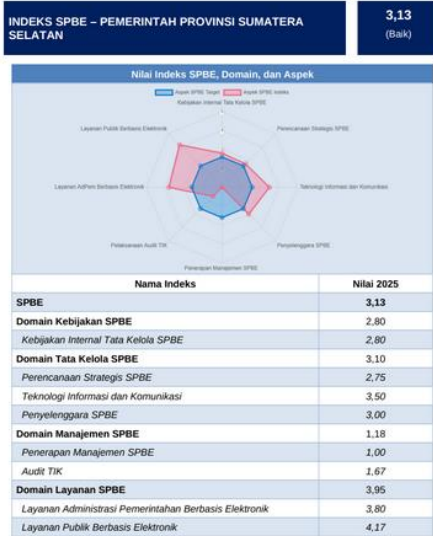
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik / Meningkatnya Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital	1.	Indeks IPTIK	5.90	5.97	100 %	(Terlampir)	-
		2.	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	56.04	*51.61	92%		
		3.	Indeks SPBE	3.04	3.13	100 %		
		4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.73	*2,72	99 %		
		5.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	375	446	100 %		

Analisa Keberhasilan :

- Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Layanan E-Government melakukan penilaian SPBE yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat **nilai indeks SPBE : 3,13** dalam **Predikat Baik** pada tahun 2025;
- Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik melalui Komisi Informasi mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah dengan predikat **“Informatif”**. Penganugerahan diberikan Komisi Informasi Pusat dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada 348 Badan Publik di Indonesia dengan kualifikasi “Informatif” nilai 96,11.
- Pada Tahun 2025 berdasarkan **Surat dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Nomor:B-655/SJ.1/PR.01.01/03/2026 Tanggal 16 Maret 2026 Hal Penyampaian Data Indeks Transformasi Digital Nasional Tahun 2023 dan 2024 Provinsi Sumatera Selatan**, menerangkan bahwa Pengukuran ITDN dilakukan dengan lagging 1 Tahun sehingga untuk kebutuhan perencanaan perhitungan ditahun 2025 masih menggunakan skor ITDN Tahun 2024 sebagai acuan sementara hingga hasil pengukuran tahun 2026 ini selesai. Hasil analisis dan interpretasi skor lebih lengkap akan dimuat dalam Buku Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional tahun 2025 yang akan dipublikasikan pada April 2026.
- Pada Tahun 2025 **Penilaian Indeks Pembangunan Statistik tidak dilaksanakan dikarenakan dari Surat BPS Nomor: B-235/02000/TS.160/2025 Tanggal 7 Mei 2025 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah**. Pada point I yang menjelaskan Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun**

sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, rencana Grand Design RB 2025 - 2045 dan Roadmap RB 2025 - 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan.

**PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DITERIMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025**

NO	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1	2	3	4	5
1.	Badan Publik dengan Kualifikasi "INFORMATIF"		Pada Tahun 2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diberikan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi "INFORMATIF" dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Pemerintah Provinsi, dengan Nilai 96,11	15 Desember 2025
NO	NAMA PRESTASI	KETERANGAN PRESTASI	PEMBERI PRESTASI	TANGGAL DITERIMA
1.	Nilai Indeks SPBE 3.13 (Predikat Baik)		Laporan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2025 - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	6 Januari 2025

2.	Nilai Indeks SPBE 3.00 (Predikat Baik)	INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 3 (Baik) Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek <table><thead><tr><th>Nama Indeks</th><th>Nilai 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>SPBE</td><td>3</td></tr><tr><td>Domain Kebijakan SPBE</td><td>2,70</td></tr><tr><td>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</td><td>2,70</td></tr><tr><td>Domain Tata Kelola SPBE</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Perencanaan Strategis SPBE</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Teknologi Informasi dan Komunikasi</td><td>3,75</td></tr><tr><td>Penyelenggara SPBE</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Domain Manajemen SPBE</td><td>1,18</td></tr><tr><td>Penerapan Manajemen SPBE</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Audit TIK</td><td>1,67</td></tr><tr><td>Domain Layanan SPBE</td><td>3,75</td></tr><tr><td>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</td><td>3,80</td></tr><tr><td>Layanan Publik Berbasis Elektronik</td><td>3,67</td></tr></tbody></table>	Nama Indeks	Nilai 2024	SPBE	3	Domain Kebijakan SPBE	2,70	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,70	Domain Tata Kelola SPBE	3,00	Perencanaan Strategis SPBE	2,50	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75	Penyelenggara SPBE	2,50	Domain Manajemen SPBE	1,18	Penerapan Manajemen SPBE	1,00	Audit TIK	1,67	Domain Layanan SPBE	3,75	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024	31 Desember 2024
Nama Indeks	Nilai 2024																															
SPBE	3																															
Domain Kebijakan SPBE	2,70																															
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,70																															
Domain Tata Kelola SPBE	3,00																															
Perencanaan Strategis SPBE	2,50																															
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75																															
Penyelenggara SPBE	2,50																															
Domain Manajemen SPBE	1,18																															
Penerapan Manajemen SPBE	1,00																															
Audit TIK	1,67																															
Domain Layanan SPBE	3,75																															
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80																															
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67																															
3.	Nilai Indeks SPBE 2,62 (Predikat Baik)	INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 2,62 (Baik) Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek <table><thead><tr><th>Nama Indeks</th><th>Nilai 2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>SPBE</td><td>2,62</td></tr><tr><td>Domain Kebijakan SPBE</td><td>2,70</td></tr><tr><td>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</td><td>2,70</td></tr><tr><td>Domain Tata Kelola SPBE</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Perencanaan Strategis SPBE</td><td>1,25</td></tr><tr><td>Teknologi Informasi dan Komunikasi</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Penyelenggara SPBE</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Domain Manajemen SPBE</td><td>1,09</td></tr><tr><td>Penerapan Manajemen SPBE</td><td>1,13</td></tr><tr><td>Audit TIK</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Domain Layanan SPBE</td><td>3,48</td></tr><tr><td>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</td><td>3,80</td></tr><tr><td>Layanan Publik Berbasis Elektronik</td><td>3,00</td></tr></tbody></table>	Nama Indeks	Nilai 2023	SPBE	2,62	Domain Kebijakan SPBE	2,70	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,70	Domain Tata Kelola SPBE	2,00	Perencanaan Strategis SPBE	1,25	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	Penyelenggara SPBE	2,00	Domain Manajemen SPBE	1,09	Penerapan Manajemen SPBE	1,13	Audit TIK	1,00	Domain Layanan SPBE	3,48	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023	11 Januari 2024
Nama Indeks	Nilai 2023																															
SPBE	2,62																															
Domain Kebijakan SPBE	2,70																															
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,70																															
Domain Tata Kelola SPBE	2,00																															
Perencanaan Strategis SPBE	1,25																															
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75																															
Penyelenggara SPBE	2,00																															
Domain Manajemen SPBE	1,09																															
Penerapan Manajemen SPBE	1,13																															
Audit TIK	1,00																															
Domain Layanan SPBE	3,48																															
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80																															
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00																															

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	Menunjang
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Menunjang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana		

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	Menunjang

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	74%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti		
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	Menunjang
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	Menunjang
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100%	Menunjang
			Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	Menunjang

			Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	100%	Menunjang
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	100%	Menunjang
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100%	Menunjang
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	100%	Menunjang
			Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	100%	Menunjang
	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	*	
	Indeks SPBE	3,13		2. Indeks SPBE		
	Indeks Pemdi			3. Indeks Pemdi		

			Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Aplikasi Pelayanan sesuai Tupoksi		
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Pengelolaan E -government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government		
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	100%	Menunjang
			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100%	Menunjang
			Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Menunjang

			Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	100%	Menunjang
			Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	100%	Menunjang
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	99%	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang mendukung Satu Data Indonesia		
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	100%	Menunjang
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100%	Menunjang
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	100%	Menunjang

	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	446	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Menunjang
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	Menunjang
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah		
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Di samping capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Pada dokumen laporan kinerja 2025 ini akan dipaparkan capaian kinerja program/kegiatan secara keseluruhan dan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebesar 90,35 %. Untuk itu Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.892.944.750	15.244.175.696	85,20
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.560.000	111.628.873	91,08
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	122.560.000	111.628.873	91,08
2	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	11.307.977.940	9.606.896.397	84,96
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.048.257.940	9.397.656.397	85,06
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	236.880.000	209.240.000	88,33

4	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	22.840.000	-	0,00
3	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	76.700.000	75.503.076	98,44
5	Pengamanan barang milik daerah SKPD	76.700.000	75.503.076	98,44
4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	324.137.500	248.812.510	76,76
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	188.856.510	94,43
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	124.137.500	59.956.000	48,30
5	Administrasi umum perangkat daerah	1.045.154.930	891.848.940	85,33
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.997.760	99,99
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.750.000	88.707.788	99,95
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	40.000.000	39.960.666	99,90
11	Penyediaan bahan logistik kantor	28.921.000	14.008.000	48,44
12	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	104.000.000	68.109.045	65,49
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	61.000.000	48.492.000	79,50
14	Fasilitas kunjungan tamu	30.000.000	6.330.000	21,10
15	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	672.483.930	606.243.681	90,15
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.215.000.000	1.205.990.966	99,26
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.000.000	794.868.003	99,36
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	415.000.000	411.122.963	99,07
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.520.414.380	2.105.816.124	83,55
18	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	10.000.000	50,00
19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	460.000.000	358.132.124	77,85

	air dan listrik			
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.040.414.380	1.737.684.000	85,16
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.281.000.000	997.678.810	77,88
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	670.000.000	413.581.982	61,73
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	120.500.000	93.782.600	77,83
23	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	90.000.000	89.818.098	99,80
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.500.000	400.496.130	100,00
Urusan Komunikasi dan Informatika				
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45
25	Pelayanan Informasi Publik	44.121.226	43.379.125,00	98,32
26	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	104.374.768	93.241.279	89,33
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	44.218.713	36.687.447,00	82,97
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	290.860.594	285.219.904,00	98,06
29	Diseminasi Informasi	3.617.588.882	3.610.889.136,00	99,81
30	Penyusunan Konten	508.191.920	461.011.314,00	90,72
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	39.708.363	38.210.784,00	96,23
32	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	81.091.132	72.641.298,00	89,58
33	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.254.295.421	1.237.982.460,00	98,70

34	Relasi Media	2.639.637.306	2.611.094.513,00	98,92
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.518.775.263	4.326.556.142	95,75
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	143.730.685	141.303.550	98,31
35	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	143.730.685	141.303.550,00	98,31
11	Pengelolaan E-Goverment di lingkup pemerintah daerah provinsi	4.375.044.578	4.185.252.592	95,66
36	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	853.033.749	828.427.212,00	97,12
37	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	580.669.880	558.200.780,00	96,13
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.576.822.005	2.470.907.206,00	95,89
39	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	54.703.250	52.269.420,00	95,55
40	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	98.017.275	75.178.106	76,70
41	Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	211.798.419	200.269.868,00	94,56
Urusan Statistik				
IV	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	366.801.933	306.613.340	83,59
12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	366.801.933	306.613.340	83,59
42	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	91.150.136	89.468.733	98,16
43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	18.288.723	3.538.016	19,35
44	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	45.532.581	28.970.089,00	63,62

45	Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	211.830.493	184.636.502,00	87,16
Urusan Persandian				
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	204.607.238	188.812.827	92,28
13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	174.734.313	159.382.642	91,21
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	27.970.055	17.522.758,00	62,65
47	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	146.764.258	141.859.884,00	96,66
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	29.872.925	29.430.185	98,52
48	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	29.872.925	29.430.185,00	98,52
TOTAL		31.607.217.509	28.556.515.265	90,35

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2025

Jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 31.607.217.509 dimana terdapat realisasi belanja sebesar Rp. 28.556.515.265 (90,35%). Dengan kata lain terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.050.702.244. Dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi sebesar 98,45 % (dari anggaran sebesar Rp. 8.624.088.325 terealisasi Rp. 8.490.357.260). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program penyelenggaraan statistik sektoral dengan realisasi sebesar 83,59% (dari anggaran sebesar Rp. 366.801.933 terealisasi Rp. 306.613.340).

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik/ Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks IPTIK						
		5,90	5,97	100%	0	0	0	
		Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah						
		56,04	*51.61	92%	0	0	0	
		Indeks SPBE						
		3,04	3,13	100%	4.518.775.263	4.326.556.142	95,75	
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)						
		2,73	*2,72	99%	366.801.933	306.613.340	83,59	
		Indeks KAMI (Keamanan Informasi)						
		375	446	100%	204.607.238	188.812.827	92,28	

Catatan : Tanda yang diberi Bintang (*)

- Pada Tahun 2025 berdasarkan **Surat dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Nomor:B-655/SJ.1/PR.01.01/03/2026 Tanggal 16 Maret 2026 Hal Penyampaian Data Indeks Transformasi Digital Nasional Tahun 2023 dan 2024 Provinsi Sumatera Selatan**, menerangkan bahwa Pengukuran ITDN dilakukan dengan lagging 1 Tahun sehingga untuk kebutuhan perencanaan perhitungan ditahun 2025 masih menggunakan skor ITDN Tahun 2024 sebagai acuan sementara hingga hasil pengukuran tahun 2026 ini selesai. Hasil analisis dan interpretasi skor lebih lengkap akan dimuat dalam Buku Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional tahun 2025 yang akan dipublikasikan pada April 2026.
- Pada Tahun 2025 **Penilaian Indeks Pembangunan Statistik tidak dilaksanakan dikarenakan dari Surat BPS Nomor: B-235/02000/TS.160/2025 Tanggal 7 Mei 2025 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah**. Pada point I yang menjelaskan Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, rencana Grand Design RB 2025 - 2045 dan Roadmap RB 2025 - 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Realisasi Keuangan			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	(Rp)	(%) Capaian	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	100%	85.20	17.892.944.750	15.244.175.696	85,20	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	91.08	122.560.000	111.628.873	91,08	
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	91,08	122.560.000	111.628.873	91,08	
2	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	84.96	11.307.977.940	9.606.896.397	84,96	
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang / Bulan	56 Orang / Bulan	85,06	11.048.257.940	9.397.656.397	85,06	
2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	88,33	236.880.000	209.240.000	88,33	
2.3	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0,00	22.840.000	-	0,00	
3	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	1 Tahun	98.44	76.700.000	75.503.076	98,44	
3.1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	98,44	76.700.000	75.503.076	98,44	

4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun	1 Tahun	76,76	324.137.500	248.812.510	76,76	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	94,43	200.000.000	188.856.510	94,43	
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	48,30	124.137.500	59.956.000	48,30	
5	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	85,33	1.045.154.930	891.848.940	85,33	
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	99,99	20.000.000	19.997.760	99,99	
5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99,95	88.750.000	88.707.788	99,95	
5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	99,90	40.000.000	39.960.666	99,90	
5.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48,44	28.921.000	14.008.000	48,44	
5.5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	65,49	104.000.000	68.109.045	65,49	
5.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	79,50	61.000.000	48.492.000	79,50	
5.7	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	21,10	30.000.000	6.330.000	21,10	
5.8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	90,15	672.483.930	606.243.681	90,15	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun	1 Tahun	99,26	1.215.000.000	1.205.990.966	99,26	

6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	99,36	800.000.000	794.868.003	99,36	
6.2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	99,07	415.000.000	411.122.963	99,07	
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	83,55	2.520.414.380	2.105.816.124	83,55	
7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	50,00	20.000.000	10.000.000	50,00	
7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	77,85	460.000.000	358.132.124	77,85	
7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	85,16	2.040.414.380	1.737.684.000	85,16	
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun	1 Tahun	77,88	1.281.000.000	997.678.810	77,88	
8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	61,73	670.000.000	413.581.982	61,73	
8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	230 Unit	230 Unit	77,83	120.500.000	93.782.600	77,83	
8.3	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Tiang Baliho yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	99,80	90.000.000	89.818.098	99,80	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	100,00	400.500.000	400.496.130	100,00	
Urusan Komunikasi dan Informatika									

II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	80%	98,50	7.281.452.965	7.172.308.228	98,50	
		2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	70%	98,17	1.342.635.360	1.318.049.032	98,17	
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%	80%	98,45	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45	
9.1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	100 Permohonan	98,32	44.121.226	43.379.125,00	98,32	
9.2	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	89,33	104.374.768	93.241.279	89,33	
9.3	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90%	90%	82,97	44.218.713	36.687.447,00	82,97	
9.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi Publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2 Media	98,06	290.860.594	285.219.904,00	98,06	
9.5	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%	99,81	3.617.588.882	3.610.889.136,00	99,81	
9.6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	7 Konten	7 Konten	90,72	508.191.920	461.011.314,00	90,72	
9.7	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	17 Komunitas	17 Komunitas	96,23	39.708.363	38.210.784,00	96,23	

9.8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	100 Orang	89,58	81.091.132	72.641.298,00	89,58	
9.9	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	98,70	1.254.295.421	1.237.982.460,00	98,70	
9.10	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	2 Laporan	2 Laporan	98,92	2.639.637.306	2.611.094.513,00	98,92	
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	90%	90%	95.75	4.518.775.263	4.326.556.142	95,75	
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%	100%	98.31	143.730.685	141.303.550	98,31	
10.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	98,31	143.730.685	141.303.550,00	98,31	
11	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Persentase Pengguna e-government	90%	90%	95.66	4.375.044.578	4.185.252.592	95,66	
11.1	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Layanan	1 Layanan	97,12	853.033.749	828.427.212,00	97,12	

		Daerah Provinsi							
11.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	96,13	580.669.880	558.200.780,00	96,13	
11.3	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	95,89	2.576.822.005	2.470.907.206,00	95,89	
11.4	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	95,55	54.703.250	52.269.420,00	95,55	
11.5	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	76,70	98.017.275	75.178.106	76,70	
11.6	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	94,56	211.798.419	200.269.868,00	94,56	
Urusan Statistik									
IV	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	89.96	348.513.210	303.075.324	86,96	
		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	19.35	18.288.723	3.538.016	19,35	
12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	Persentase data yang tersedia	100%	100%	83.59	366.801.933	306.613.340	83,59	

12.1	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	98,16	91.150.136	89.468.733	98,16	
12.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	100 Orang	19,35	18.288.723	3.538.016	19,35	
12.3	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	63,62	45.532.581	28.970.089,00	63,62	
12.4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	87,16	211.830.493	184.636.502,00	87,16	
Urusan Persandian									
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	92,28	204.607.238	188.812.827	92,28	
13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	91,21	174.734.313	159.382.642	91,21	
13.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	62,65	27.970.055	17.522.758,00	62,65	
13.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	96,66	146.764.258	141.859.884,00	96,66	
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	98,52	29.872.925	29.430.185	98,52	

14.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	98,52	29.872.925	29.430.185,00	98,52	
	TOTAL				90,35	31.607.217.509	28.556.515.265	90,35	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Capaian yang diperoleh berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah amat baik. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja maupun anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 yaitu 100,00 % yang didasarkan pada ketentuan skala penilaian peringkat kinerja;
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 90,35 %.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;

2. Meningkatkan akses pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;
3. Meningkatkan layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
4. Peningkatan SDM bagi ASN melalui pelatihan, pendidikan dan Bimtek.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada periode mendatang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

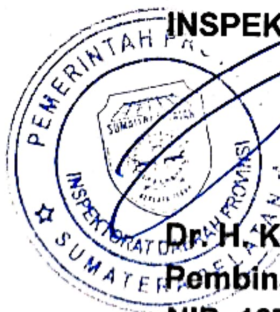
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 08 April 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001